



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AVICENNA MEDISICA SANIPUTERA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 465101

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.886.347.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 524 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 706.347.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 368.500.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, YAMAHA RXS Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOTOR, HONDA TRAIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 54.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 16.983.380**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.325.830.380**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.325.830.380



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.